

Tingkatkan Kompetensi Pranata Humas, KLHK Laksanakan Bimbingan Teknis

Subhan Riyadi - SULSEL.JURNALIS.ID

Sep 9, 2023 - 20:31



SULSEL- Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan intens dalam meningkatkan sinergitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta kompetensi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Sinergitas pengelolaan peran Humas Pemerintah lingkup internal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Bimtek Jabatan

Fungsional Pranata Humas resmi dimulai pada Jumat, 8 September 2023 di Grand Cokro Hotel Yogyakarta.

Perhelatan 'Kongres Humas KLHK' ini juga mendapat atensi langsung dari Biro Hubungan Masyarakat dan Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal KLHK bersama Kementerian Kominfo RI serta Iprahumas Indonesia.

Kepala Biro Humas KLHK Nunu Anugrah mengatakan dalam sambutannya Perhatian peran Pranata Humas mendukung aspek dalam meningkatkan peran Kementerian kita.

"Bagaimana mengorkestrasi kegiatan kita dan memberikan citra positif," pesan Nunu.

Ditambahkannya dengan Manajemen kehumasan adalah bagaimana menghubungkan peran pemerintah dan masyarakat sebagai audiens.

Selanjutnya bagaimana menyampaikan komunikasi 2 (dua) arah dalam menyampaikan program aksi kita tersebut kepada Masyarakat.

Ditegaskannya adalah menjadi tugas kita dalam rancangan dan implikasinya kepada masyarakat dalam mengawal capaian organisasi kita.

"Tetap semangat dalam menjalankan tugas menjaga bumi, hutan dan lingkungan," tutur Kepala Biro Humas KLHK ini.

Sementara, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hasyim Gautama mengatakan perlunya peningkatan kompetensi pelayanan informasi dan kehumasan.

"Turbelensi info digital sedemikian masif. Peran netijen juga sangat dashyat terlebih pada isu-isu yang lagi trend," terangnya.

Diterangkannya untuk kedepan pranata humas akan melakukan konversi angka kredit dari konvensional ke integrasi.

"Selanjutnya akan dikonversi nilai SKP menjadi besaran angka kredit sesuai besaran tabelnya dalam kenaikan pangkat dan penyesuaian," jelas Hasyim.

Kembali dijelaskannya, Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH), Kami juga terus berupaya meningkatkan kualitas SDM Pranata Humas

Melalui "aplikasi Simphoni" atau Sistem Informasi Manajemen Pranata Humas yang Profesional dan Inovatif, Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Kemenkominfo ini kembali menyatakan dalam aplikasi ini berimplikasi pada berkurangnya surat menyurat dan akses pengecekan mandiri.

Jika selama ini proses layanan dilakukan berbasis persuratan yang rumit dan membutuhkan proses panjang, Diharapkan kehadirannya dapat memberikan kemudahan akses dalam layanan pembinaan secara digital kepada para Pranata Humas di seluruh Indonesia.

"Hampir mencapai jumlah 200 Pranata Humas yang telah selesai target konversinya dan seterusnya kepada 1500 orang lebih agar konversinya bisa masuk dan punya akun dalam layanan simphoni ini,"jelasnya lagi.

Dengan admin mandiri di 'simphoni' sebagai platform digital bukan hanya sebagai pengajuan angka kredit tetap juga sebagai layanan uji kompetensi.

Kita juga mendorong peninjauan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya melalui Kementerian PAN-RB

Pada usulan jenjang level baru yakni ahli utama.

Tak lupa juga, Sebagai bahan pertimbangan diajukan juga dokumen kode etik dan perilaku insan Iprahumas sebagai landasan kode etik sekaligus pembeda bagi profesi fungsional lainnya.

"Upaya ini tidak sekadar melakukan layanan, tetapi melakukan visi dan langkah bersama dalam membina pejabat fungsional Pranata Humas,"pungkasnya.

Dikesempatan yang sama,

Ketua Umum Ikatan Pranata Humas Indonesia (IPRAHUMAS) Thoriq Ramadani mengungkapkan pesan dari Bapak Presiden RI Joko Widodo bahwa apa goal terakhir dari persepsi sebuah image? ingin ada trust dari rakyat, dari dunia.

Sesuai Direktif Bapak Presiden tentang Kehumasan yakni; Humas harus mempunyai agenda setting dan narasi tunggal.

"Jelaskan isu secara terbuka kepada masyarakat, Humas harus aktif berkomunikasi kepada rakyat, Jangan ego sektoral, Jangan tarung informasi antar instansi pemerintah serta Dorong keterlibatan publik dalam pengambilan keputusan,"terangnya.

"Kehadiran organisasi Iprahumas Indonesia merujuk Pasal 5 Angka 2 Permen PAN RB No. 6 Tahun 2014 "Instans Pembina (Kementerian Kominfo) bertugas memfasilitasi pembentukan organisasi profesi. Pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi Jafung,"beber Ketum Iprahumas.

"Berdasarkan Inpres 09/2015, Permen PAN RB 30/2011 dan Nomor 06 Tahun 2014 bahwa Dalam pengelolaan Komunikasi Publik adalah dengan menyampaikan kebijakan dan program Pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat,"ungkap Thoriq.

Diutarakannya lagi, Tugas Humas Pemerintah adalah Melaksanakan komunikasi antara pemerintah dan publik yang terencana untuk menciptakan saling pengertian dalam tujuan demi manfaat bersama.

"Meningkakan kelancaran arus informasi dan aksesibilitas publik,"imbuhnya.

"Meningkatkan koordinasi dalam penyebarluasan informasi tentang kebijakan Pemerintah,

Membangun citra dan reputasi positif,"jelasnya

Ketua Iprahumas Indonesia ini kembali membeberkan ruang lingkup tugas, tanggungjawab dan wewenang Pranata Humas yakni Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi.

"Dengan core values BerAKHLAK: Berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif,"terangnya.

'Dengan misi meningkatkan citra dan reputasi positif Pemerintah, Menyosialisasikan kebijakan dan program Pemerintah , Membangun SDM Pranata Humas yang kompeten dan memperkuat organisasi profesi Pranata Humas,"pesannya.

Lebih lanjut Ketua Iprahumas ini menekankan Perlunya unsur Audit Komunikasi, hal ini berdasarkan Permen PAB RB 27/2011 bertujuan Mengetahui posisi Instansi Pemerintah di Mata Publik.

"Efektivitas pesan serta Mengetahui seberapa efisien anggaran yang digunakan,"pungkasnya.

Selanjutnya Bimtek ini juga menghadirkan Diskusi Panel bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tentang Manajemen Karir Pranata Humas melalui Simphoni, Biro Kepegawaian KLHK, Jenjang Karir Jabatan Fungsional Pranata Humas dan Uji Kompetensi Pranata Humas.

Kegiatan akbar kehumasan lingkup KLHK Tahun 2023, dipusatkan di 'Kota Pelajar' Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dihadiri puluhan peserta dari Pejabat fungsional Pranata Humas/Calon Pejabat fungsional Pranata Humas lingkup KLHK dari seluruh penjuru Indonesia.

Citizen Report: ISH